

# KONFERENSI ILMIAH AKUNTANSI I

SEMINAR, CALL FOR PAPERS, STUDENT COLLOQUIUM



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
The Indonesian Institute of Accountants  
Kompartemen Akuntan Pendidik  
Widyaiswara Jakarta - Banten

Badan Akuntan Nasional  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Bekerjasama dengan



MERCU BUANA  
UNIVERSITAS  
Mercu Buana



UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI



UNIVERSITAS  
ISLAM  
SULTAN IBRAHIM



UNIVERSITAS  
NEGERI  
SEMARANG



UIN "SUNAN"  
KALIJAGA



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
JAKARTA



UIN  
SUNAN  
GUNUNG DJATI



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
JAKARTA



KALDIS  
KAMPUS  
AKADEMI DAN  
INDUSTRI



UIN  
SUNAN  
DURENREJO



UNIVERSITAS  
BINA NUSANTARA

TEMA

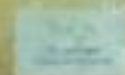
"Sinergitas Peran Akuntan dan  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meningkatkan  
Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan"

## PROCEEDINGS

Didukung Oleh :



PT. Surya Inti Sewit Kahuripan



Ruang Auditorium Lantai 7 Gedung Tawa  
Universitas Mercu Buana, Jl. Meruya Selatan No  
Kemhangan, Jakarta Barat

Rabu - Kamis, 26 - 27 Februari 2014

### Sekretariat IAI KAPd JB

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mercu Buana  
Jl. Meruya Selatan No. 1  
Jakarta Barat 11650.  
Telp (084) 0816, ext. 5303,  
Fax (021) 5871312.  
Home Page: [www.kra.iaikapdjb.org](http://www.kra.iaikapdjb.org)  
Email: [kra.iaikapdjb@gmail.com](mailto:kra.iaikapdjb@gmail.com)

ISBN

978-602-18898-1-7

<i>BUMN yang Tendaftar di BEI Tahun 2001-2011j</i>	
<i>Drs. Marsyaf, Ak., M.Ak</i>	
<i>Alokasi Dana Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan</i>	
<i>Elzar Sinambela, SE, Msi</i>	38
<i>Pengaruh Manajemen Laba, Asimetri Informasi, dan Pengungkapan Modal Intelektual terhadap Biaya Modal Ekuitas</i>	
<i>Ravita Mawardani dan Istianingsih</i>	39
<i>Sistem Pengendalian Manajemen, Set Kesempatan Investasi, Inovasi, Kinerja terhadap Kebijakan Akuntansi</i>	
<i>Ali Sandy Mulya dan Sekar Mayangsari</i>	40
<b>Bidang Kajian : Akuntansi Pemerintah</b>	
<i>Karakteristik Pemerintah Daerah, Korupsi dan Kinerja Keuangan Daerah</i>	
<i>Hudaka A Hastoro dan Djoko Suhardjanto</i>	61
<i>Pengembangan Model Audit Pertanggungjawaban Sosial yang Efektif pada Organisasi Sektor Publik dengan Pendekatan Human Centered Design</i>	
<i>Priyo Supraba, Diana Suteja dan Soegeng Soetedjo</i>	42
<i>Perkembangan Tren Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Periode 2001-2011</i>	
<i>Mahendra Satrya Yudha, Ari Kuncara W dan Santosa, T.H</i>	43
<i>Meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah</i>	
<i>Nadri Mulya</i>	44
<i>Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Good Government Governance serta Implikasinya</i>	
<i>Fitriani Saragih</i>	45
<i>Analisis Variasi Anggaran Pemerintah Daerah:Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan</i>	
<i>Syabri Abdullah dan Ramadhaniatun Nazry</i>	46
<i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Daerah 33 Propinsi di Indonesia</i>	
<i>Mutiah, SE, M.Si</i>	47
<b>Bidang Kajian : Perpajakan</b>	
<i>Mengungkap Realitas Kesadaran Wajib Pajak UKM di Bali:lengan Falsafah Yahnya Ni Putu Eka Widastuti, Eko Ganis Sukaharsono, Gugus Irianto</i>	48
<i>Review Interim Kewajiban Perpajakan untuk Menentukan Signifikansi Risiko Pajak (Studi Kasus pada PT SM)</i>	
<i>Lusy Suprajati, Vidi Nurul Septiyani dan Mitzy Adalalae</i>	49
<i>Kecenderungan Topik Penelitian Perpajakan di Indonesia (Periode 2001-2011)</i>	
<i>Hapsari Pradipta, Ari Kuncara W dan Santosa, T.H</i>	50
<i>Analisis Pengetahuan Perpajakan, Perilaku yang Adil, Niat Berperilaku Patuh dan Kemudahan Pengisian SPT terhadap Kepatuhan Pajak Pemilik Online Shop (Wilayah Jakarta dan Tangerang)</i>	
<i>Indriana Nurul Kusumaningtyas, Prof. Dr. Ahmad Rodani dan Yulianti, SE.,M.Si</i>	51
<i>Analisa Untung-Rugi PPh Final UKM Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 Versus Menggunakan Norma Pertanggung</i>	52

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS  
INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP *GOOD GOVERNMENT*  
*GOVERNANCE* SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PADA SKPD SE KOTA MEDAN**

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA [f\\_saragih31@yahoo.com](mailto:f_saragih31@yahoo.com)

**BIDANG KAJIAN**  
**Sistem Informasi, Pengauditan, dan Etika Profesi (SPE)**

**KONFERENSI ILMIAH AKUNTANSI I IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK (IAIKAPd WILAYAH JAKARTA  
BANTEN)**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 26-27 FEBRUARI 2014**

# **PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SKPD SE KOTA MEDAN**

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA [f\\_saragih31@yahoo.com](mailto:f_saragih31@yahoo.com)

*This research purpose to determine the influence of the Governmental Accounting Application and Accounting Information Quality Governance against Good Government and the implication of Financial Performance.*

*The research was conducted on regional work units (SKPD) Medan using the census method. The data was collected by spreading questionnaire questionnaires and browsing in Medan City Government Website .. Data analysis and hypothesis testing is done using multiple regression analysis and simple.*

*The results showed that (1) The application of government accounting, accounting information quality governance and good government that does not have a significant influence on financial performance SKPD in Medan. Influence the application of government accounting, accounting information quality governance and good government that does not have a significant influence on financial performance in the city of Medan SKPD low at 17.4% (2) The application of governmental accounting and accounting information quality has a significant influence on good government governance SKPD in Medan. Influence the application of government accounting and accounting information quality on good government governance SKPD in Medan is high at 33.3%. (3) The application of governmental accounting and accounting information quality has no significant influence on financial performance SKPD in Medan. Influence the application of government accounting and accounting information quality on financial performance in the city of Medan SKPD low at 11.5%. (4) Good governance government has no significant influence on financial performance SKPD in Medan. The influence of good government governance to financial performance SKPD in Medan is very low at 0.1%.*

*Keywords: Government Accounting, Accounting information, Good Government Governance, Financial performance*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Gerbong reformasi di Indonesia telah bergerak, sejarah baru ini secara politis telah mengubah arah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia secara menyeluruh pada hampir semua aspek kehidupan bernegara. Salah satu perubahan yaitu upaya untuk menciptakan *good governance* (tata kelola yang baik) yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, nepotisme dan penciptaan sistem pemerintahan yang relatif lebih berimbang di antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Tata pemerintahan yang baik tersebut menuntut pemerintah melakukan reformasi ke seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud adalah aspek hubungan pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah. Pada aspek ini hal yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang luas dan nyata yang harus diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Otonomi daerah yang bergulir saat ini, oleh pemerintah pusat telah ditampung dalam Undang-undang (UU) Nomor. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah ini telah resmi mulai dilaksanakan pada awal tahun 2001 yang lalu. Salah satu konsekuensi lebih lanjut dari UU tersebut adalah perlunya diatur tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU Nomor 33/2004 yang mengatur hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya UU Nomor 33/2004 tersebut maka pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah ini, pemerintah daerah sering mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana itu sendiri maupun dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Dengan kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan asli daerah tersebut, maka untuk dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah perlu diterapkan akuntansi pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan sangat perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga publik yang merupakan tuntunan bagi lembaga publik untuk dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Salah satu media yang berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah adalah pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas sektor publik mengharuskan pemerintah daerah melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja Pemerintah Daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability* (Abdul Halim, 2004:4). Dalam hal ini, pemerintah daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan serta dilayani secara baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 diamanatkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitan ini tersirat adanya perubahan *single entry* menjadi *double entry bookkeeping* dan perubahan teknik atau sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis *accrual*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan pewujudan *good government governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian *double entry* dapat menghasilkan laporan keuangan yang *auditabile*.

Mardiasmo (2001:6) mengungkapkan ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh akuntabilitas laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah, dan belum dilakukannya reformasi di bidang pengelolaan anggaran, yaitu yang menyangkut cakupan anggaran, format dan klasifikasi anggaran, manajemen kas pemerintah dan pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Di samping itu, banyak ditemukan keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan

Menurut Mardiasmo (2001:6), lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah dalam hal penyampaian laporan realisasi anggaran. Penyampaian laporan realisasi anggaran daerah belum dilengkapi dengan laporan aliran kas dan neraca daerah yang melibatkan seluruh unit-unit pusat pertanggungjawaban di daerah. Selain itu, kelemahan pemerintah daerah pun terlihat dari ketidakmampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu, pengeluaran daerah terus meningkat secara dinamis, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan ini pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing* yang dapat mempengaruhi tingkat efisien dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah.

Permasalahan-permasalahan di atas menurut Mardiasmo (2004:2) merupakan pengambat terwujudnya *good governance*. Jika dilihat dari kaca mata Akuntansi Pemerintahan terdapat tiga permasalahan utama mengapa *Good Governance* masih jauh dari kenyataan. **Pertama**, belum adanya sistem akuntansi pemerintahan daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pelaporan secara handal. Tidak adanya system akuntansi yang handal menyebabkan lemahnya pengendalian intern (*internal control*) pemerintah daerah. **Kedua**, sangat terbatasnya jumlah personel pemerintahan daerah yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak begitu peduli atau mungkin tidak mengerti dengan permasalahan ini. Di sisi lain, sangat sedikit sarjana akuntansi yang berkualitas yang tertarik untuk mengembangkan profesinya di pemerintahan daerah karena kompensasi yang rendah yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. **Ketiga**, belum diterapkannya secara penuh Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang baku, sedangkan Standar Akuntansi tersebut sangat penting sebagai pedoman untuk pembuatan laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Belum diterapkannya standar akuntansi secara penuh akan menimbulkan implikasi negative berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Sementara itu Warsidi (2009) memberikan beberapa fakta substantif yang disarikan dari beberapa berita dan simpulan seminar yang dipublikasikan melalui media: **Pertama**, kualitas laporan keuangan pemerintah ternyata masih sangat rendah, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari masih banyaknya hasil audit BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan opini selain wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan, audit atas 293 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2008 dan satu LKPD tahun 2007 oleh BPK ternyata menghasilkan 8 LKPD mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 217 LKPD Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 21 LKPD Tidak Wajar (TW) dan 47 LKPD Disclaimer. **Kedua**, rendahnya kualitas laporan keuangan tersebut disebabkan oleh aparat pemerintah yang resisten terhadap reformasi pengelolaan keuangan negara. Mental korup juga masih kuat di pemerintahan. **Ketiga**, kemampuan pemerintah dalam menyusun dan melaporkan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan juga masih terbatas. Hal

ini sebagian disebabkan oleh tidak memadainya SDM yang menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah. **Keempat**, sementara itu, pendidikan akuntansi di perguruan tinggi selama ini hanya menekankan akuntansi sektor bisnis (*private*). Akuntansi sektor publik, termasuk di dalamnya akuntansi pemerintahan, masih belum diperhatikan secara memadai.

Selanjutnya Nunuy Nur Afiah (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan ke DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menghasilkan opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Walaupun telah memiliki peraturan perundangan dan pedoman untuk pengelolaan keuangan pusat dan daerah, namun pada kenyataannya kondisi pengelolaan keuangan pusat dan daerah di Indonesia masih memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan indikasi bahwa pelaporan keuangan pusat ataupun daerah yang diperiksa BPK sebagian besar belum berhasil memperoleh opini WTP. Bahkan, laporan keuangan pemerintah pusat selama 5 tahun berturut-turut (2004-2008) mendapat opini TMP (*disc/aimer*). Di lingkungan pemerintah daerah, selama 3 tahun (2006-2008), jumlah pemda yang memperoleh WTP memang meningkat. Namun, jumlah tersebut tidak lebih dari 3 persen dari keseluruhan LKPD dari 482 pemda di seluruh Indonesia. Penyebab utamanya adalah belum adanya komitmen dari para kepala daerah dan DPRD untuk mencapai kualitas tinggi dalam pengelolaan keuangan. Faktor lain kelemahan SDM di bidang akuntansi dan audit di pemda, karena sangat sedikit tenaga akuntan yang bekerja di sektor pemerintah daerah. Keadaan ini diperparah dengan tidak ditematkannya SDM yang sesuai dengan bidangnya karena alasan yang kurang profesional.

Dengan melihat permasalahan yang diungkapkan di atas, maka penegakan unsur-unsur tata kelola pemerintahan yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi akan bermanfaat dalam meningkatkan kinerja pemerintah melalui terciptanya penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Solikhin (2010), dimana meneliti tentang pengaruh penerapan akuntansi pemerintah, kualitas informasi akuntansi dan kualitas aparatur daerah terhadap *good government governance* dan implikasinya terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten-kota se Jawa Barat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel kualitas aparatur daerah untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap *Good Government Governance* Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1 Apakah penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap *good government governance*
- 2 Apakah penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan
- 3 Apakah penerapan *Good Governmnet Governance* Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan



- 4 Apakah penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi serta *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan

## **2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200, Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Kustadi Arinta (1993) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai berikut :Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (public execution) khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (budget execution) termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat dan unit pemerintahan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintahan berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintahan serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

### **2.2. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebutuhan akan standar akuntansi pemerintahan menguat ketika di sector komersil mengeluarkan standar akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1994. Kebutuhan tersebut mulai eksplisit dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada tahun 2002, Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Komite ini sampai dengan pertengahan tahun 2004 telah menghasilkan draf standar akuntansi pemerintahan yang terdiri dari kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar. Komite yang dibentuk Menteri Keuangan ini kemudian diganti dasar pembentukannya dengan Keputusan Presiden sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. Draft standar akuntansi pemerintahan dimintakan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan setelah mendapat pertimbangan dari BPK kemudian diajukan kepada Presiden untuk segera ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pada tanggal 13 Juni 2005 standar akuntansi pemerintahan ditetapkan oleh Presiden dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005.

Menurut Mardiasmo (2004) ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standard akuntansi, antara lain :

1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi
2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan baik auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independent saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan sesuatu organisasi serta saat membuktikan kewajaran
3. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

### **2.3. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar



Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (2005: KK-7), setiap unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berisi upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
- b. Manajemen
- c. Transparansi
- d. Keseimbangan Antargenerasi

#### **2.4.Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan**

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (2005: KK-12), prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditatai oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi., oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Menurut KSAP, ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

- a. Basis Akuntansi
- b. Nilai Historis (*Historical Cost*)
- c. Realisasi (*Realization*)
- d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)
- e. Periodisitas (*Periodicity*)
- f. Konsistensi (*Consistency*)
- g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
- h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

#### **2.5.Tujuan Laporan Keuangan Pemerintahan**

Tujuan menyeluruh dari akuntansi dan pelaporan keuangan unit pemerintahan adalah (1) menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial serta mewujudkan fungsi pengelolaan (*stewardship*) dan pertanggungjawaban (*accountability*); (2) menyediakan informasi yang berguna untuk melakukan evaluasi kinerja manajerial dan kinerja organisasi. Sistem akuntansi yang dirancang secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula, (Rowan, 2000 ; Wilkinson, 2000).

Selanjutnya Rowan (2000) mengemukakan bahwa laporan keuangan pemerintahan mempunyai lima tujuan, yaitu:

1. Laporan keuangan berguna dalam menyediakan informasi dalam menentukan dan memperkirakan aliran, saldo dan persyaratan kebutuhan sumber daya keuangan organisasi jangka pendek.
2. Laporan keuangan berguna dalam menyediakan informasi untuk menentukan dan memperkirakan kondisi ekonomi unit organisasi dan perubahannya.

3. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk memonitor kinerja yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, persyaratan kontrak dan perjanjian lainnya.
4. Menyediakan informasi yang berguna untuk perencanaan dan penganggaran, serta berguna pula untuk memperkirakan pengaruhnya terhadap perolehan dan alokasi sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan operasional yang tertentu.
5. Menyediakan informasi yang bermanfaat untuk melakukan evaluasi kinerja manjerial dan kinerja organisasi.

## **2.6. Komponen Laporan Keuangan Pemerintahan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah: **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) pendapatan;
- b) belanja;
- c) transfer;
- d) surplus/defisit;
- e) pembiayaan;
- f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

## **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-

barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) kas dan setara kas;
- b) investasi jangka pendek;
- c) piutang pajak dan bukan pajak;
- d) persediaan;
- e) investasi jangka panjang;
- f) aset tetap;
- g) kewajiban jangka pendek;
- h) kewajiban jangka panjang;
- i) ekuitas dana.

### **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d) pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- e) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- f) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g) daftar dan skedul.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

## **2.7. Teknik Akuntansi keuangan**

Menurut Rowan (2000:156), Mardiasmo (2002:150), dan Indra Bastian (2001:153) bahwa ada lima teknik akuntansi keuangan yang digunakan dalam sektor publik, yaitu

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Komitmen
3. Akuntansi Kas
4. Akuntansi Akrua
5. Akuntansi Dana

## **2.8. Kualitas Informasi Akuntansi**

Agar informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, maka bagian akuntansi dituntut dapat menyajikan informasi akuntansi yang berkualitas. Berkualitas di sini artinya yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Hilton, et al (2000:551) menjelaskan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas adalah sebagai berikut:

*Three characteristic of information determine its usefulness for decision making (1) Relevance. Information is relevant if it is pertinent to a decision problem (2) Accuracy. Information that is pertinent to a decision problem must also be accurate (3) Timeliness. Relevant and accurate data are valuable only if they are timely, that is available in time for a decision*

Selanjutnya Horngren, et al (2003:168) lebih menekankan pada informasi yang relevan dan akurat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan:

*Information used for decision making would be perfectly relevant and accurate. Precise but irrelevant information is worthless for decision making. Imprecise but relevant information can be useful. Relevant is more crucial than precision in decision making.*

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP, 2005:38) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintahan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan
- b. Handal
- c. Dapat dibandingkan,
- dan d. Dapat dipahami

### **3.1.1. Good Government Governance**

Sejak awal 1990-an, *Good Governance* telah menjadi credo baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kendati demikian, masih terdapat beberapa perbedaan penekanan, walaupun terdapat persamaan fokus dan ide utamanya. UNDP, misalnya, memberikan penekanan khusus pada pembangunan manusia yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan transformasi administrasi publik (UN Report, 1998). Sementara itu, Bank Dunia lebih memberikan perhatian pada pendayagunaan sumber daya sosial dan ekonomi bagi pembangunan. Sedangkan *Organisation for Economic Cooperation dan Development* (OECD) menekankan pada penghargaan hak-hak asasi manusia, demokrasi dan legitimasi pemerintah.

Secara konseptual, *Good Governance* oleh UNDP dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. Merujuk pada konsepsi tersebut, *Good Governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama *Good Governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik. Dalam konteks itu, mekanisme kontrol (*check and balance*) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan absolut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem, struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku atau budaya kerjanya.

Di kebanyakan negara berkembang, perhatian utama terhadap *Good Governance* dalam kaitan dengan penggunaan otoritas dan manajemen sektor publik, adalah pervasifnya korupsi yang cenderung menjadi karakter tipikal yang melekat. Bahkan di beberapa negara terbukti bahwa budaya korupsi telah begitu melekat di dalam birokrasi pemerintah yang justru ditandai oleh kelangkaan sumber daya. Dalam konteks itu, absennya akuntabilitas sangat menonjol dan menjadi satu karakter dominan budaya administrasi selama periode tertentu.

*United Nation Development Program* (UNDP) pada tahun 1997 mendefinisikan *Good Governance* sebagai berikut : *Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and the means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well-being of their population* yang artinya : Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain suatu hubungan yang sinerjik dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*state, prevate, society*). Namun dalam kenyataan, negara (*state*) masih menjadi yang paling dominan.

Berdasarkan definisi tersebut UNDP mengemukakan 9 karekteristik prinsip-prinsip *Good Governance* yang saling mengait sebagai berikut :

1. Partisipasi (*Participation*), setiap warga mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan;
2. Taat Hukum (*Rule of Law*), hukum keadilan dilaksanakan tanpa pandang bulu;
3. Transparansi (*Transparency*), kebebasan informasi untuk dipahami dan dimonitor;
4. Responsif (*Responsiveness*), lembaga-lembaga berusaha melayani setiap *stakeholdersnya* dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
5. Berorientasi pada Kesepakatan (*Consensus Orientation*), menjadi perantara terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama;

6. Kesetaraan (*Equity*), semua warga mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan;
7. Efektif dan Efisien (*Effectiveness and Efficiency*), proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin;
8. Akuntabilitas (*Accountability*), pemerintah, swasta, masyarakat, bertanggung jawab kepadapublik dan lembaga stakeholders;

Menurut Arie Soelendro (2000:13), unsur- unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility* dan *accountability*. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) berpendapat bahwa unsur-unsur *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), *peningkatan efisiensi di segala bidang (efficiency)*, tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah

## 2.9. Kinerja Keuangan

Menurut Edy Sukarno ( 2000:111) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian dan rasio efektifitas ( Mahmudi, 2005:6).

Kinerja Keuangan berdasarkan rasio kemandirian, yaitu derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai rasionya maka menggambarkan semakin besar partisipasi masyarakat dan semakin rendahnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Rasio kemandirian dapat dihitung sebagai berikut:

- a. Rumus 1 
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$
- b. Rumus 2 
$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$
- c. Rumus 3 
$$\frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dengan kata lain rasio efektivitas menggambarkan sejauhmana rencana penerimaan PAD berhasil direalisasikan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Selain itu *Government Accounting Standard Board (GASB)*, dalam *Concept Statements No. 2*, membagi pengukuran kinerja dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator pengukuran *service efforts*, (2) indikator pengukuran *service accomplishment*, dan (3) indikator yang menghubungkan antara *efforts* dengan *accomplishment*. *Service efforts* berarti bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam. *Service accomplishment* diartikan sebagai prestasi dari program tertentu. Di samping

itu perlu disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja ini (*explanatory information*). Pengukuran-pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan apakah efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan/jasa tersebut.

Pembandingan *service efforts* dengan *service accomplishment* merupakan dasar penilaian efisiensi operasi pemerintah (GASB, 1994). *Measure of Efforts Efforts* atau usaha adalah jumlah sumber daya keuangan dan non keuangan, dinyatakan dalam uang atau satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan suatu program atau jasa pelayanan. Pengukuran *service efforts* meliputi pemakaian rasio yang membandingkan sumber daya keuangan dan non keuangan dengan ukuran lain yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang diberikan seperti populasi umum, populasi jasa atau panjang jalan raya. Contoh sumber daya keuangan adalah biaya gaji, fasilitas pegawai, peralatan, perlengkapan dan kontrak-kontrak pelayanan. Pengukuran efforts yang berkaitan dengan sumber daya keuangan antara lain adalah dana yang digunakan untuk pendidikan dan dana pendidikan untuk per orang siswa, dana untuk transpor public dan dana transpor publik per orang, dana untuk investigasi kejahatan dan dana investasi kejahatan per kapita. Tampak bahwa pengukuran efforts ini selain melihat pemakaian dana untuk kegiatan tertentu, juga pemakaian dana untuk kegiatan tertentu tersebut dikaitkan dengan jumlah pengguna.

Contoh sumber daya non keuangan yang paling utama adalah jumlah personalia pemerintah. Ukuran yang paling sering dipakai adalah jumlah pegawai (ekuivalen dengan pegawai dengan jam kerja penuh) atau jumlah jam kerja per jasa yang diberikan. Misalnya jumlah guru untuk seluruh murid atau per murid. Selain personalia, contoh sumber daya non keuangan adalah fasilitas umum lainnya seperti kendaraan, gedung pemerintah atau jalan raya.

Wayne C. Parker (1996:3) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan.

Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru.

2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian system pengukuran standar seperti halnya management by objectives untuk mengukur outputs dan outcomes.

3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.

4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.



Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan obyektif.

5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Lebih lanjut, Wayne C, Parker (1996:10) membuat sebuah model laporan penelitian mengenai pelaksanaan program-program pengukuran kinerja pemerintah yang dilakukan di negara-negara bagian di Amerika Serikat. Model ini memberikan status yang jelas mengenai kondisi program-program pengukuran kinerja pemerintah dan melihat berapakah jumlah negara bagian yang benar-benar menjalankan program ini dengan bagus. Dengan pengamatan ini diharapkan pemerintah juga lebih terfokus dalam menetapkan dan melaksanakan program pengukuran kinerja yang benar-benar menjadi prioritas.

## **2.10. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Informasi Akuntansi terhadap *Good Government Governance* serta implikasinya terhadap kinerja keuangan daerah**

Scout, W.R (2000) menyatakan bahwa kebijakan akuntansi perusahaan akan dipilih sebagai bagian dari masalah yang lebih luas, yaitu meminimumkan biaya kontrak. Dengan demikian, pemilihan kebijakan akuntansi dapat dianggap sebagai *corporate governance* yang efisien

Drobetz,W; K. Gugler and S. Hirschvogel (2004) menunjukkan bahwa determinan dari peringkat *corporate governance* adalah konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan direksi dan jenis standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan.

Rowan ,Jones and Pendlebury, Maurice (2000) sistem akuntansi yang dirancang secara baik akan menjamin dilakukannya Prinsip Stewardship dan Accountability dengan baik pula

Mardiasmo (2002) menyatakan tujuan menyeluruh dari akuntansi dan pelaporan keuangan unit pemerintahan adalah: menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi politik dan sosial serta mewujudkan fungsi pengelolaan (*stewardship*) dan pertanggungjawaban (*accountability*)

Deni Darmawati (2005) memberikan pendapat lemahnya *Corporate Governance* sering disebut sebagai penyebab terjadinya skandal-skandal akuntansi yang terungkap akhir-akhir ini. Skandal-skandal akuntansi tersebut menunjukkan bahwa adanya masalah pengungkapan dalam laporan keuangan sebagai akibat dari rendahnya kualitas *Corporate Governance* dan akan berdampak negatif pada kinerja perusahaan.

Bowen.R.M.,S. Rajgopal, and M. Venkatachalam (2002) menunjukkan bahwa *corporate governance* memiliki peran dalam membatasi manajemen laba oportunistik (meningkatkan kualitas pelaporan keuangan) dan dengan meningkatnya kualitas pelaporan keuangan maka nilai perusahaan akan meningkat pula.

Black,B.S: H.Jang and W.Kim (2003) menyatakan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan Kinerja perusahaan

Mas Achmad Daniri (2005) menyatakan bahwa penerapan prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.

## 2.11. Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian dengan bentuk pengujian hipotesis biasanya memiliki tujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang telah dinyatakan dalam hipotesis penelitian. Agar pengujian hipotesis yang dimulai dari pengumpulan data dapat menjadi lebih jelas dan terarah maka variabel-variabel yang ada dalam penelitian tersebut harus dioperasionalkan.

Operasional variabel adalah kegiatan mengoperasionalkan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur oleh peneliti dilakukan dengan cara melihat dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep. Mengoperasionalkan sebuah konsep adalah dengan mengidentifikasi karakteristik dari konsep tersebut. Konsep yang telah dioperasionalkan tersebut selanjutnya yang kita kenal sebagai variabel (Sekaran dan Bougie, 2010,127).

Sebelum variabel dalam penelitian ini dioperasionalkan maka berikut di bawah ini diidentifikasi terlebih dahulu variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Penerapan Akuntansi (X1)	1. Tujuan Laporan Keuangan	- Tersedianya Informasi mengenai kecukupan penerimaan dalam membiayai pengeluaran	0
		- Tersedianya informasi mengenai cara perlakuan sumber dana dan pengalokasian sesuai anggaran	R
		- Tersedianya informasi mengenai jumlah sumber dana serta hasil yang telah dicapai	D
		- Tersedianya informasi mengenai cara pendanaan entitas yang mencukupi kebutuhan kas	I
		- Tersedianya informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas	N
		- Tersedianya informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas	A
		- Tersedianya informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas	L
	2. Komponen Laporan Keuangan	- Laporan realisasi anggaran, Ketersediaan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya	0
		- Neraca, Ketersediaan informasi setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan	R
			D
			I

		<p>setelah tanggal pelaporan</p> <p>-Laporan Arus Kas, Ketersediaan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan , pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi</p> <p>-Catatan atas Laporan Keuangan, ketersediaan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas untuk menghindari kesalahan dalam membaca laporan keuangan</p>	<p>N</p> <p>A</p> <p>L</p>
	3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	<p>-Basis Akuntansi, penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual untuk neraca dan basis kas untuk laporan realisasi anggaran</p> <p>-Nilai historis, aset dan kewajiban dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar</p> <p>-Realisasi</p> <p>-Substansi Mengungguli bentuk Formal</p> <p>-Periodisitas</p> <p>-Konsistensi</p> <p>-Penyajian Wajar</p> <p>-Pengungkapan lengkap</p>	<p>0</p> <p>R</p> <p>D</p> <p>I</p> <p>N</p> <p>A</p> <p>L</p>
Kualitas Informasi Akuntansi (X2)	Relevan	<p>-1</p> <p>-2</p> <p>-3</p> <p>-4</p>	<p>0</p> <p>R</p>
	Andal	<p>1. Penyajian jujur</p> <p>2. Dapat di diversifikasi</p> <p>3. Netralitas</p>	<p>D</p>

	Dapat dibandingkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang temuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya</li> <li>- Informasi yang temuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan instansi yang sejenis</li> </ul>	I N A
	Dapat dipahami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna</li> </ul>	L
	Akurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informasi yang dihasilkan adalah informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan penggunanyat,</li> <li>2) Informasi yang dihasilkan adalah informasi yang teliti sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan</li> <li>3)</li> <li>4) Informasi yang dihasilkan adalah informasi yang cermat sesuai dengan kebutuhan penggunanya</li> </ol>	
<i>Good Government Governance</i> (Y)	1Akuntabilitas	<p>Pada Tahap pembuatan keputusan harus dibuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan</li> <li>▪ Memenuhi standar etika</li> <li>▪ Sesuai dengan visi dan misi organisasi</li> <li>▪ Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi</li> <li>▪ Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.</li> <li>▪ Pada tahap sosialisasi kebijakan</li> <li>▪ Penyebarluasan informasi mengenai suatu putusan melalui media masa</li> <li>▪ Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program</li> </ul>	0 R D I N A L

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akses publik pada informasi atas keputusan dan mekanisme pengaduan masyarakat</li> <li>▪ Tersedianya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah</li> </ul>	
	2. Transparansi	<p>Adanya mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik</p> <p>Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik terhadap berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di dalam sektor publik</p> <p>Adanya mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparatur publik di dalam kegiatan melayani</p>	0 R D I N A L
	3. Partisipasi Masyarakat	<p>Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh publik</p> <p>Tersedianya proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan dari publik</p> <p>Adanya pendelegasian otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik</p>	0 R D I N A L
Kinerja Keuangan SKPD (Z)	Efektifitas Penerimaan PAD	Pembagian antara Realisasi Penerimaan PAD dengan Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah	Rasio

		dikalikan seratus persen	
--	--	--------------------------	--

## 2.12. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi terhadap *good government governance* serta implikasinya terhadap kinerja keuangan daerah dilakukan uji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini juga menguji asumsi klasik yang melekat pada persamaan model regresi sehingga data-data yang digunakan dalam pengujian hipotesis bebas dari asumsi klasik (Gujarati, 1995; Imam Ghozali, 2001). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dilakukan dengan melihat signifikansi korelasi diantaranya variabel independen, di mana jika terdapat korelasi yang signifikan antara semua variabel independen, angka yang diisyaratkan adalah hingga mencapai nilai 1,00 dan nilai VIF tidak lebih besar dari 10 (Gujarati, 1995). Untuk mendeteksi adanya *autocorrelation*, melihat pada nilai *Durbin Watson* dari persamaan regresi. Menurut Sugiyono dan Eri Wibowo: (2001;201) apabila nilai *Durbin-Watson* di bawah 5 maka tidak terjadi *autokorelasi*, Untuk mendeteksi adanya *heteroskedastisitas* dilakukan dengan melihat grafik plot seperti yang disarankan oleh Imam Ghazali (2001), jika terlihat di grafik titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y maka halini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Untuk melihat normalitas dilakukan dengan analisis grafik, distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *ploting* data akan dibandingkan dengan garis diagonal (Ghazali, 2001). Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*) dan analisis regresi sederhana, karena terdapat lebih dari satu variabel independen (Gujarati, 1995). Model persamaan regresi untuk pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

**Hipotesis satu:** Penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap *good government governance*

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

**Hipotesis kedua:** Penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan

$$Z = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

**Hipotesis ketiga:** *Good Governmnet Governance* Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

$$Z = a + \beta_i Y + e$$

**Hipotesis keempat:** Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Serta *Good Government Governance* Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

$$Z = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_i Y + e$$

Keterangan:

a = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien Regresi

Z = Kinerja Keuangan SKPD (*Financial Performance*)

Y = *Good Government Governance*

X<sub>1</sub> = Penerapan Akuntansi Pemerintahan

X<sub>2</sub> = Kualitas Informasi Akuntansi

e = error

Pengujian hipotesis diuraikan sebagai berikut:

- a. Uji parsial (koefisien regresi) atau disebut uji t, yaitu untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individual apakah berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Gujarati, 1995; Imam Ghazali, 2001). Untuk pengujian ini dilakukan dengan melihat probabilitas uji parsial pada tabel *coefficient significant* pada output tabel Anova yang dihasilkan dengan bantuan program aplikasi SPSS di mana jika nilai probabilitas (*p-value*) < 0,05, maka hipotesis diterima, (koefisien regresi signifikan) pada tingkat signifikansi 5% (lima persen).
- b. Pengukuran persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen, ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi nilai *R-Square* ( $R^2$ ) antara 1 dan nol, di mana nilai *R-Square* ( $R^2$ ) yang mendekati satu memberikan persentase pengaruh yang besar (Hair, 1998). Nilai *R-Square* dapat menjelaskan kesesuaian (*best fit model*) atau tidaknya model regresi yang digunakan sehingga dapat diketahui apakah variabel independen yang ada tersebut mampu menjadi *predicator* yang baik di dalam suatu persamaan model regresi yang diuji (Hair, 1998).
- c. Pengujian terhadap pengaruh variabel independen secara bersama (simultan) dilakukan uji F, yaitu untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati, 1995, Imam Ghazali, 2001). Untuk pengujiannya dilihat dari nilai probabilitas (*p-value*) yang terdapat pada tabel Anova nilai F dari data hasil olahan (output) program aplikasi SPSS, di mana jika probabilitas (*p-value*) < 0,05, maka secara simultan keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama pada tingkat signifikansi 5% (lima persen).

### 3.METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh penerapan akuntansi, dan kualitas informasi akuntansi terhadap *good government governance* dan implikasinya terhadap kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini akan dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya seluruh dinas yang ada di Kota Medan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *survey-explanatory*.

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh SKPD yang ada di Kota Medan. Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka sampel penelitian yang diambil adalah seluruh populasi (sensus), Suharsimi Arikunto (2006:120). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah seluruh SKPD yang ada di Kota Medan. Sedangkan yang dijadikan responden dari setiap SKPD adalah Kepala SKPD atau Wakil Kepala SKPD.

Data kualitatif atau primer diperoleh dari responden dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Kuesioner, Wawancara, Observasi, Data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan pertimbangan bahwa kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Untuk itu diperlukan dua macam pengujian yaitu uji Validitas (*test of validity*) dan uji reliabilitas (*test of reliability*). Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi terhadap *good government governance* serta implikasinya terhadap kinerja keuangan daerah dilakukan uji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini juga menguji asumsi klasik yang melekat pada persamaan model regresi sehingga data-data yang digunakan dalam pengujian hipotesis bebas dari asumsi klasik (Gujarati, 1995; Imam Ghazali, 2001).



## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Tanggapan Responden**

Berdasarkan kuesioner yang berhasil dikumpulkan dari berbagai responden pada SKPD di Kota Medan, maka dapat disusun distribusi tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang ada.

#### **A. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penerapan Akuntansi Pemerintahan (X1)**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa secara umum SKPD di Kota Medan telah menerapkan akuntansi pemerintahan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada lampiran yang menunjukkan bahwa 50,33% responden telah melakukan penerapan akuntansi pemerintahan secara maksimal dan dapat dikategorikan tinggi. Sedangkan sisanya sebanyak 49,67% responden dapat dikategorikan cukup. Variabel penerapan akuntansi pemerintahan (X1) terdiri dari 3 dimensi yang terdiri dari Tujuan Laporan Keuangan, Komponen Laporan Keuangan dan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

#### **B. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Informasi Akuntansi (X2).**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa secara umum SKPD di Kota Medan memiliki kualitas informasi akuntansi yang baik. Hal ini dapat dilihat pada lampiran yang menunjukkan bahwa 51,59% responden menyatakan bahwa kualitas informasi akuntansi dari SKPD sangat baik. Sedangkan sebanyak 42,06% responden menyatakan baik, dan sisanya 6,36% menyatakan kurang baik. Variabel kualitas Informasi Akuntansi (X2) terdiri dari 5 dimensi yang terdiri dari Relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami dan akurat.

#### **C. Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Good Government Governance* (Y)**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa secara umum SKPD di Kota Medan telah menerapkan *Good Government Governance* cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada lampiran yang menunjukkan bahwa 18,95% responden telah menerapkan *Good Government Governance* dengan baik, sebanyak 65,54% responden dapat dikategorikan cukup dan sisanya 15,51% dikategorikan kurang. Variabel *Good Government Governance* (Y) terdiri dari 3 dimensi yang terdiri dari Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat.

#### **D. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja Keuangan SKPD (Z)**

Variabel kinerja keuangan daerah (Z) diukur dengan menggunakan efektifitas penerimaan PAD. Dari hasil penelitian diperoleh hasil untuk variabel kinerja keuangan (Z) diketahui bahwa 5,5% responden telah memiliki kinerja keuangan yang dapat dikategorikan sangat tinggi, 11,1% dikategorikan tinggi, 5,5% dikategorikan sedang, 11,1% masuk dalam kategori cukup sedangkan 66,7% dapat dikategorikan memiliki kinerja keuangan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebahagian besar SKPD di Kota Medan masih memiliki kinerja keuangan yang rendah. Hal ini kemungkinan penerapan akuntansi pemerintah kurang dilaksanakan dengan baik, sehingga kualitas informasi yang dihasilkan juga rendah dan pada akhirnya kinerja keuangan juga rendah.

#### **Pengujian Kualitas Data**

Sebelum analisis data dikerjakan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian atas data yang diperoleh meliputi uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan program SPSS version 17.

#### A. Uji Validitas

Pengujian validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis atas pertanyaan yaitu dengan mengorelasikan skor tiap butir pertanyaan dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Syarat minimum untuk memenuhi syarat apakah setiap pertanyaan valid atau tidak, dengan membandingkan dengan  $r\text{-tabel} = 0,30$  (Sugiyono (2003)). Berdasarkan ketentuan tersebut maka, jika korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir dalam pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Sebaliknya jika korelasi antara butir dengan skor total lebih besar dari 0,30 dinyatakan valid.

#### 1. Uji Validitas Variabel Penerapan Akuntansi Pemerintahan Pada SKPD di Kota Medan

Berdasarkan pengolahan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS maka hasil uji validitas variabel Penerapan Akuntansi Pemerintahan dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel.1**

#### Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Penerapan Akuntansi Pemerintahan

Nomor Butir Pertanyaan	Validitas	r-tabel	Keterangan
X1.1	0,838	<b>0,30</b>	Valid
X1.2	0,929		Valid
X1.3	0,838		Valid
X1.4	0,695		Valid
X1.5	0,925		Valid
X1.6	0,734		Valid
X1.7	0,592		Valid
X1.8	0,695		Valid
X1.9	0,521		Valid
X1.10	0,929		Valid
X1.11	0,592		Valid
X1.12	0,929		Valid
X1.13	0,734		Valid
X1.14	0,592		Valid
X1.15	0,838		Valid
X1.16	0,929		Valid

X1.17	0,929		Valid
-------	-------	--	-------

Sumber: Lampiran Pengolahan SPSS

Dari Tabel.1 di atas diketahui bahwa semua pernyataan pada kuesioner tentang penerapan akuntansi pemerintahan dinyatakan valid, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

## 2. Uji Validitas Variabel Kualitas Informasi Akuntansi pada SKPD di Kota Medan

Berdasarkan pengolahan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS maka hasil uji validitas variabel Kualitas Informasi Akuntansi dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel.2**

**Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Kualitas Informasi Akuntansi**

Nomor Butir Pertanyaan	Validitas	r-tabel	Keterangan
X2.1	0,980	<b>0,30</b>	Valid
X2.2	0,851		Valid
X2.3	0,980		Valid
X2.4	0,980		Valid
X2.5	0,980		Valid
X2.6	0,745		Valid
X2.7	0,980		Valid
X2.8	0,980		Valid
X2.9	0,636		Valid
X2.10	0,980		Valid
X2.11	0,980		Valid
X2.12	0,955		Valid
X2.13	0,636		Valid
X2.14	0,980		Valid

Sumber: Lampiran Pengolahan SPSS

Dari Tabel.2 di atas diketahui bahwa semua pernyataan pada kuesioner tentang kualitas informasi akuntansi dinyatakan valid, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

## 3. Uji Validitas Variabel *Good Government Governance* pada SKPD di Kota Medan

Berdasarkan pengolahan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS maka hasil uji validitas variabel *Good Government Governance* dapat ditunjukkan pada tabel berikut

**Tabel.3****Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel *Good Government Governance***

Nomor Butir Pertanyaan	Validitas	r-tabel	Keterangan
Y.1	0,816	<b>0,30</b>	Valid
Y.2	0,662		Valid
Y.3	0,552		Valid
Y.4	0,662		Valid
Y.5	0,552		Valid
Y.6	0,662		Valid
Y.7	0,611		Valid
Y.8	0,575		Valid
Y.9	0,662		Valid
Y.10	0,693		Valid
Y.11	0,597		Valid
Y.12	0,366		Valid
Y.13	0,634		Valid
Y.14	0,642		Valid
Y.15	0,628		Valid
Y.16	0,642		Valid
Y.17	0,642		Valid

Sumber: Lampiran Pengolahan SPSS

Dari Tabel.3 di atas diketahui bahwa semua pertanyaan pada kuesioner tentang *good government governance* dinyatakan valid, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

### **B. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk menentukan tingkat keandalan kuesioner adalah dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja

. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Dalam mengukur reliable ini SPSS memberikan fasilitas dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Menurut Nunnaly dalam Ghazali (2009) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,80$ . Hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

#### **1. Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Akuntansi Pemerintahan Pada SKPD Di Kota Medan.**

Hasil uji reliabilitas untuk variabel penerapan akuntansi pemerintahan yang diperoleh dengan menggunakan nilai *Alpha Cronbach*. Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel.4**  
**Hasil Uji Reliabilitas Item Pertanyaan Variabel**  
**Penerapan Akuntansi Pemerintahan**

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Standar	Keterangan
<b>Penerapan Akuntansi Pemerintahan</b>	0,9591	0,80	Reliabel

Sumber : Lampiran pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel penerapan akuntansi pemerintahan sebesar 0,9591 yang berarti lebih besar dari nilai 0,80 sehingga hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan akuntansi pemerintahan dapat dinyatakan reliabel dan dapat dijadikan alat ukur.

## 2. Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Informasi Akuntansi Pada SKPD Di Kota Medan

Hasil uji reliabilitas untuk variabel kualitas informasi akuntansi yang diperoleh dengan menggunakan nilai *Alpha Cronbach*. Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut

**Tabel.5**  
**Hasil Uji Reliabilitas Item Pertanyaan Variabel**  
**Kualitas Informasi Akuntansi**

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Standar	Keterangan
<b>Kualitas Informasi Akuntansi</b>	0,9832	0,80	Reliabel

Sumber : Lampiran pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel.5 di atas diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel kualitas informasi akuntansi sebesar 0,9832 yang berarti lebih besar dari nilai 0,80 sehingga hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas informasi akuntansi dapat dinyatakan reliabel dan dapat dijadikan alat ukur.

## 3. Uji Reliabilitas Variabel *Good Government Governance* Pada SKPD Di Kota Medan

Hasil uji reliabilitas untuk variabel *good government governance* yang diperoleh dengan menggunakan nilai *Alpha Cronbach*. Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas Item Pertanyaan Variabel**  
***Good Government Governance***

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Standar	Keterangan
<i>Good Government Governance</i>	0,8957	0,80	Reliabel

Sumber : Lampiran pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel.6 di atas diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel *Good Government Governance* sebesar 0,8957 yang berarti lebih besar dari nilai 0,80 sehingga hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang berhubungan dengan *Good Government Governance* dapat dinyatakan reliabel dan dapat dijadikan alat ukur.

### Analisis Data

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi *normalitas*, *multikolinieritas*, *heteroskedastisitas*, dan *autokorelasi* seperti yang terlihat dalam lampiran. Maka model regresi yang memenuhi tidak adanya asumsi kalsik tersebut hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel.7**

**Hasil Analisis Regresi Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Serta *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Keuangan SKPDDi Kota Medan**

Variabel Independen & Konstanta	Koefisien Regresi	Standard Error	Significance
Constanta	0,242	0,651	0,716
Penerapan Akuntansi Pemerintahan	0,017	0,010	0,115
Kualitas Informasi Akuntansi	0,006	0,010	0,573
<i>Good Government Governance</i>	-0,012	0,012	0,335
R(square) R <sup>2</sup> F Sig.F	= 0,174 = 0,983 = 0,429		

Sumber: lampiran Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun persamaan regresi setelah perbaikan model sebagai berikut:

$$Z = 0,242 + 0,017X_1 + 0,006X_2 - 0,012 Y + e$$

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dilihat bahwa besarnya konstanta adalah 0,242, berarti bahwa dengan asumsi variabel independen bernilai nol maka kinerja keuangan berada pada posisi 0,242 . Sementara itu koefisien X<sub>1</sub> diperoleh sebesar 0,017, dan koefisien X<sub>2</sub> diperoleh sebesar 0,006 serta koefisien Y diperoleh sebesar -0,012. Artinya apabila X<sub>1</sub> naik sebesar satu persen maka kinerja keuangan juga naik sebesar 0,1017 bila variabel bebas lainnya dianggap konstan. Apabila variabel X<sub>2</sub> naik sebesar satu persen maka kinerja keuangan akan naik sebesar 0,006 jika variabel bebas lainnya dianggap konstan. Dan jika variabel Y naik sebesar

satu persen maka kinerja keuangan akan turun sebesar 0,012 jika variabel bebas lainnya dianggap konstan.

**Tabel.8**

**Hasil Analisis Regresi Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap *Good Government Governance* SKPD Di Kota Medan**

Variabel Independen & Konstanta	Koefisien Regresi	Standar of Error	Significance
Constanta	5,940	14,201	0,682
Penerapan Akuntansi Pemerintahan	0,502	0,187	0,017
Kualitas Informasi Akuntansi	0,309	0,196	0,135
R(square) R <sup>2</sup>	= 0,333		
F	= 3,749		
Sig.F	= 0,048		

Sumber: Lampiran Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun persamaan regresi setelah perbaikan model sebagai berikut:

$$Y = 5,940 + 0,502X_1 + 0,309X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dilihat bahwa besarnya konstanta adalah 5,940, berarti bahwa dengan asumsi variabel independen bernilai nol maka *good government governance* berada pada posisi 5,940 . Sementara itu koefisien X<sub>1</sub> diperoleh sebesar 0,502, dan koefisien X<sub>2</sub> diperoleh sebesar 0,309. Artinya apabila X<sub>1</sub> naik sebesar satu persen maka *good government governance* juga naik sebesar 0,502 bila variabel bebas lainnya dianggap konstan. Apabila variabel X<sub>2</sub> naik sebesar satu persen maka *good government governance* akan naik sebesar 0,309 jika variabel lainnya dianggap konstan.

**Tabel.9**

**Hasil Analisis Regresi Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Berpengaruh Kinerja Keuangan SKPD Di Kota Medan**

Variabel Independen & Konstanta	Koefisien Regresi	Standard of Error	Significance
Constanta	0,312	0,648	0,481
Penerapan Akuntansi Pemerintahan	0,012	0,009	0,196
Kualitas Informasi Akuntansi	0,002	0,009	0,832
R(square) R <sup>2</sup>	= 0,115		
F	= 0,976		
Sig.F	= 0,400		

Sumber: Lampiran Pengolahan Data



Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun persamaan regresi setelah perbaikan model sebagai berikut:

$$Z = 0,312 + 0,012 X_1 + 0,002 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dilihat bahwa besarnya konstanta adalah 0,312, berarti bahwa dengan asumsi variabel independen bernilai nol maka kinerja keuangan berada pada posisi 0,312. Sementara itu koefisien  $X_1$  diperoleh sebesar 0,012, dan koefisien  $X_2$  diperoleh sebesar 0,002. Artinya apabila  $X_1$  naik sebesar satu persen maka kinerja keuangan juga naik sebesar 0,012 bila variabel bebas lainnya dianggap konstan. Apabila variabel  $X_2$  naik sebesar satu persen maka kinerja keuangan akan naik sebesar 0,002 jika variabel bebas lainnya dianggap konstan.

**Tabel.10**  
**Hasil Analisis Regresi Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Keuangan SKPD Di Kota Medan**

Variabel Independen & Konstanta	Koefisien Regresi	Standard of Error	Significance
Constanta	0,345	0,426	0,431
<i>Good Government Governance</i>	0,000	0,010	0,929
R(square) $R^2$	= 0,023		
F	= 0,008		
Sig.F	= 0,929		

Sumber: Lampiran Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun persamaan regresi setelah perbaikan model sebagai berikut:

$$Y = 0,345 + 0,000 Y + e$$

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dilihat bahwa besarnya konstanta adalah 0,345, berarti bahwa dengan asumsi variabel independen bernilai nol maka kinerja keuangan berada pada posisi 0,345. Sementara itu koefisien  $Y$  diperoleh sebesar 0,000, Artinya apabila  $Y$  naik sebesar satu persen maka kinerja keuangan sama sekali tidak mengalami kenaikan atau bernilai 0,000.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Serta *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Keuangan SKPD Di Kota Medan

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diikhtisarkan pada tabel.7 menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  adalah 0,983 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,429 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak pada tingkat signifikansi = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan, kualitas informasi akuntansi serta *good government governance* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan.

Dari hasil pengujian statistik juga didapat nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,417. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,17,4 ini menunjukkan besarnya variasi dari variabel kinerja keuangan yang dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 serta Y adalah sebesar 17,4 %, sedangkan sisanya sebesar 82,6 % dijelaskan atau merupakan kontribusi variabel lain tetapi tidak terdapat dalam model penelitian ini. Rendahnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan, kualitas informasi akuntansi serta *good government governance* tidak mampu mempengaruhi kinerja keuangan SKPD yang ada di Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan, kualitas informasi akuntansi serta *good government governance* memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan. Tidak adanya pengaruh signifikan ini dikarenakan hasil temuan di lapangan bahwa walaupun penerapan akuntansi pemerintahan sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas ternyata akuntabilitas dari masing-masing SKPD masih rendah, begitu juga dengan transparansinya serta partisipasi masyarakat yang kurang dilibatkan dalam memberikan masukan kepada SKPD sehingga anggaran yang dimilikinya tidak diketahui dialokasikan kemana dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan SKPD. Tidak signifikannya pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan, kualitas informasi akuntansi serta *good government governance* juga dikarenakan adanya variabel lain yang kemungkinan memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan kinerja keuangan SKPD. Temuan di lapangan diketahui bahwa kinerja keuangan SKPD rendah hal ini dapat dilihat dari keseluruhan SKPD yang ada hanya satu SKPD yang memiliki kinerja yang tinggi sedangkan hampir sebahagian memiliki kinerja yang rendah. Rendahnya kinerja keuangan ini karena sebahagian dari alokasi anggaran yang diterima SKPD ternyata penyerapannya terhadap program-program yang dilaksanakan masih rendah. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Deni Darmawati (2005) yang menyatakan bahwa kualitas dari *good governance* yang rendah akan berdampak negatif pada kinerja keuangan entitas. Selanjutnya temuan ini tidak mendukung pendapat Balck.B.S. H.Jang dan W.Kim (2003) dan solikhin (2010).

## **2. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap *Good Government Governance* SKPD Di Kota Medan**

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diikhtisarkan pada tabel.8 menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  adalah 3,749 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,048 yang berarti lebih kecil dari 0,05. . Hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada tingkat signifikansi = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *good government governance* pada SKPD di Kota Medan.

Dari hasil pengujian statistik juga didapat nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,333. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,333 ini menunjukkan besarnya variasi dari variabel *good government governance* yang dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 adalah sebesar 33,3 %, sedangkan sisanya sebesar 66,7 % dijelaskan atau merupakan kontribusi variabel lain tetapi tidak terdapat dalam model penelitian ini. Pengaruh kedua variabel ini dapat dikategorikan cukup tinggi. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan, kualitas informasi mampu mempengaruhi *good government governance* SKPD yang ada di Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *good government governance*.

Adanya pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi terhadap *good government governance* karena penerapan akuntansi pemerintahan yang baik yang sesuai dengan standar yang berlaku merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang baik pula. Dengan informasi akuntansi yang baik menunjukkan bahwa organisasi telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang baik pula. Temuan dilapangan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan yang dilakukan oleh SKPD telah sesuai dengan standar yang berlaku juga sesuai dengan perundang-undangan yang ada sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan pada akhirnya akan mempengaruhi pemerintahan yang baik pula. Tata pemerintahan yang baik menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi di segala aspek, salah satunya adalah aspek akuntansi pemerinthan yang baik pula. Penelitian ini mendukung pendapat Balck.B.S. H.Jang dan W.Kim (2003) dan penelitian yang dilakukan oleh solikhin (2010) yang keduanya menyatakan bahwa penerapan akuntansi dan kualitas informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap *good government governance*.

### **3. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan SKPD Di Kota Medan**

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diikhtisarkan pada tabel.9 menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  adalah 0,976 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,400 yang berarti lebih besar dari 0,05. . Hal ini berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak pada tingkat signifikansi = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan.

Dari hasil pengujian statistik juga didapat nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,115. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,115 ini menunjukkan besarnya variasi dari variabel kinerja keuangan SKPD yang dapat dijelaskan oleh  $X_1$  dan  $X_2$  adalah sebesar 11,5 %, sedangkan sisanya sebesar 88,5 % dijelaskan atau merupakan kontribusi variabel lain tetapi tidak terdapat dalam model penelitian ini. Pengaruh kedua variabel ini dapat dikategorikan rendah. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan, kualitas informasi belum mampu mempengaruhi kinerja keuangan SKPD yang ada di Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan dengan kinerja keuangan SKPD. Tidak signifikannya pengaruh ini dikarenakan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa walaupun penerapan akuntansi pemerintahan telah baik sehingga menghasilkan informasi akuntansi yang baik pula namun di ketahui bahwa kinerja keuangan SKPD hampir keseluruhan memiliki kinerja yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas bukan satu-satunya variabel yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan SKPD. Kemungkinan adanya variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Temuan ini tidak mendukung pendapat Balck.B.S. H.Jang dan W.Kim (2003) dan solikhin (2010).

### **4. Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Keuangan SKPD Di Kota Medan**

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diikhtisarkan pada table.10 menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  adalah 0,090 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,929 yang berarti lebih besar dari 0,05. .

Hal ini berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak pada tingkat signifikansi = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *good government governance* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan.

Dari hasil pengujian statistik juga didapat nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,001. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,001 ini menunjukkan besarnya variasi dari variabel kinerja keuangan SKPD yang dapat dijelaskan oleh Y adalah sebesar 0,1 %, sedangkan sisanya sebesar 99,9 % dijelaskan atau merupakan kontribusi variabel lain tetapi tidak terdapat dalam model penelitian ini. Pengaruh variabel ini dapat dikategorikan sangat rendah. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik belum mampu mempengaruhi kinerja keuangan SKPD yang ada di Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good government governance* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD. Tidak signifikannya pengaruh kedua variabel dikarenakan temuan di lapangan menunjukkan hasil bahwa sebahagian SKPD memiliki *good government governance* yang cukup baik, namun ternyata kinerja keuangan yg dihasilkan tergolong rendah. Hal ini menunjukkan pemerintahan yg baik belum dapat mendorong SKPD untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya, Selain itu kinerja keuangan yang rendah ini terjadi karena sebagian SKPD walaupun telah memiliki tupoksi yang jelas namun masih belum memiliki program yang cukup jelas sehingga anggaran yang dimilikinya tidak terserap secara penuh sehingga pada akhirnya kinerja keuangan juga akan rendah.

## **5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN KONTRIBUSI PRAKTIS**

### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya , maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntansi pemerintahan, kualitas informasi akuntansi serta *good government governance* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan. pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan, kualitas informasi akuntansi serta *good government governance* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan rendah yaitu sebesar 17,4% . Hal ini berarti bahwa penerapan akuntansi pemerintahan, kualitas informasi akuntansi serta *good government governance* merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan SKPD di Kota Medan.
2. Penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *good government governance* SKPD di Kota Meda. Pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi terhadap *good government governance* SKPD di Kota Medan cukup tinggi yaitu sebesar 33,3%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntansi pemerintahan maka kualitas informasi akuntansi akan semakin tinggi pula. Penerapan akuntansi pemerintahan yang baik dan berkualitasnya informasi akuntansi menunjukkan adanya pemerintahan yang baik pula
3. Penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan. Pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan rendah yaitu sebesar 11,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi yang baik belum mampu menjamin meningkatnya kinerja keuangan SKPD.

4. *Good government governance* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan. Pengaruh *good government governance* terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan sangat rendah yaitu sebesar 0,1%. Hal ini berarti pemerintahan yang baik di SKPD di Kota Medan belum mampu meningkatkan kinerja keuangannya.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dalam variabel yang diteliti. Sebaiknya penelitian lanjutan menambah variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Seperti: kompetensi SDM, regulasi, dan anggaran.

## 5.3. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada SKPD kota medan untuk meningkatkan *good government governance* dan meningkatkan kinerja keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal-agent theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Carr, Jered B. & Ralph S. Brower. 2000. Principled opportunism: Evidence from the organizational middle. *Public Administration Quarterly* (Spring): 109-138.
- Douglas, P.C. & B. Wei. 2000. Integrating ethical dimension into a model of budgeting slack creation. *Journal of Business Ethics* 28: 267-278.
- Elgie, Robert & Erik Jones. 2000. Agents, Principals and the Study of Institutions: Constructing a Principal-Centered Account of Delegation. *Working documents in the Study of European Governance* Number: 5. Center for the Study of European Governance (CSEG).
- Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). *Working paper 147*.
- Gilardi, Fabrizio. 2001. *Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation*. Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.
- Halim, Abdul. 2002. Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. *Disertasi*.
- Johnson, Cathy Marie. 1994. *The Dynamics of Conflict between Bureaucrats and Legislators*. Armonk, New York: M.E. Sharpe.
- Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. The political economy of public expenditures. *Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- \_\_\_\_\_. 2003a. Management and public organization: The principal-agent framework. University of Geneva and National University of Singapore. *Working paper*.

- \_\_\_\_\_. 2003b. Relevance of the principal-agent framework to public policy and implementation. University of Geneva and National University of Singapore. *Working paper*.
- Lupia, Arthur & Mathew McCubbins. 1994. Who controls? Information and the structure of legislative decision making. *Legislative Studies Quarterly* 19(3):361-384.
- Lupia, Arthur & Mathew McCubbins. 2000. Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research* 37: 291-307.
- Mardiasmo .2007. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Masih Dihadapi Beberapa Kesulitan, *Jurnal Otonomi Daerah*. Vol VII No 2 Juni-Juli 2007
- Mardiasmo.2006. **Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance** **JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH** Vol. 2, No. 1, Mei 2006 Hal 1 – 17
- Mardiasmo.2002. ELABORASI REFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *JAAI VOLUME 6 NO. 1, JUNI 2002*
- Nunuy Nur Afiah (2004) Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Panganggaran dan Kualitas Informasi Keuangan Terhadap Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Disertasi UNPAD, Tidak dipublikasikan.
- Petrie, Murray. 2002. A framework for public sector performance contracting. *OECD Journal on Budgeting* 2: 117-153.
- Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Seabright, Paul. 1996. Accountability and decentralisation in government: An incomplete contracts models. *European Economic Review* 40: 61-89.
- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* (Fall): 325-353.
- Strom, K. 2000. Delegation and accountability in parliamentary democracies. *European Journal of Political Research* 37: 261-289.
- Soelendro, Ari (2000). *Paradigma Baru Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta
- Solikhin, Ikin (2010), Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Informasi Akuntansi, dan Kualitas Aparatur Daerah Terhadap Good Government Governance serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten-Kota Se Jawa Barat, Disertasi UNPAD, tidak dipublikasikan
- Urip Santoso dan Yohanes Joni Pambelum .2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis* (2008)m Vol. 4 No. 1 hal. 14-33
- Warsidi (2009) Masalah-masalah dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan: studi pendahuluan ,<http://www.warsidi.com/2009/12>.di download tgl 6 maret 2011

